

PEMERINTAH



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2021**



DINAS PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi system akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk menyusun LKjIP Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan (LKjIP) Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota bertujuan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota dalam mencapai target kinerja Tahun 2021, dan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

1.2. TUGAS DAN WEWENANG

a) Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan

b) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Dinas Perikanan mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perikanan

- Fungsi

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perikanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

c) Struktur Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah / Perencanaan
- c. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari:
 1. Analisis Akuakultur
 2. Pengelolaan Kesehatan Ikan
 3. Statistisi
- d. Bidang Perlindungan Usaha Perikanan, terdiri dari:
 1. Penggerak Swadaya Masyarakat
 2. Analis Pembiayaan dan Resiko Keuangan
 3. Analisis Ketahanan Pangan
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri dari:
 1. Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan;
 2. Analisis Pasar Hasil Perikanan
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d) SDM Pegawai /Aparatur

Jumlah aparatur Pemerintah di Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 sebanyak 55 orang yang terdiri dari 18 orang PNS, 2 orang CPNS dan 35 orang Tenaga Kontrak. Sebanyak 45 orang bertugas di Kantor Dinas Perikanan dan 10 orang bertugas di UPT Balai Benih Ikan. Penyuluh Perikanan yang berjumlah 14 Orang yang terdiri dari 7 orang Penyuluh PNS dan 7 Orang Penyuluh Perikanan Bantu berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah binaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari tingkat pendidikan aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Ket |
|---------------|----------------------|-----------------|-----|
| 1 | Strata 2 (S2) | 5 Orang | |
| 2 | Strata 1 (SI) | 12 orang | |
| 3 | Diploma III (D III) | 2 orang | |
| 4 | SMU | 1 Orang | |
| Jumlah | | 20 Orang | |

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Perikanan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Ket |
|---------------|----------------------|-----------------|-----|
| 1 | Strata 2 (S2) | - | |
| 2 | Strata 1 (SI) | 12 Orang | |
| 3 | Diploma III (D III) | 8 Orang | |
| 4 | SMA | 11 Orang | |
| 5 | SD | 4 Orang | |
| Jumlah | | 35 Orang | |

1.3 ISU ISU STRATEGIS

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dan dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Penurunan kualitas lingkungan potensial budidaya ikan baik berupa alih fungsi lahan potensial budidaya
2. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehingga masih ditemui adanya serangan hama penyakit ikan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
4. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberian jaminan sosial bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan
5. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat
7. Meningkatnya tuntutan akan produk perikanan yang aman bagi kesehatan manusia
8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan pengelolaan sumber daya perikanan

9. Masih rendahnya jumlah kelompok perikanan yang aktif dan cakupan bina kelompok

1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan menghadapi permasalahan - permasalahan yang sering terjadi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya pada Tabel 1.3

Tabel 1.3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|------------|---|---|---|
| 1. | Belum Optimalnya Produksi dan produktivitas perikanan | 1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang unggul | 1. Masih rendahnya jumlah luas lahan baru budidaya perikanan (skema investasi) 2. Masih rendahnya jumlah kolam baru yang dibangun 3. Masih sedikitnya jumlah bangsal pembenihan yang dibangun 4. Masih rendahnya jumlah jenis ikan lokal yang dibudidayakan 5. Masih sedikitnya jumlah obat-obatan ikan 6. Masih rendahnya jumlah demplot peningkatan kualitas air 7. Masih rendahnya jumlah pengujian sampel ikan 8. Masih rendahnya jumlah pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB dan CPIB 9. Masih rendahnya jumlah benih, calon induk dan pakan |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---------------|---|---|
| | | | <p>yang didistribusikan</p> <p>10. Masih sedikitnya jumlah pembinaan teknis yang dilakukan</p> |
| | | <p>2. Rendahnya Jumlah kelompok Perikanan yang Aktif</p> | <p>1. Masih sedikitnya jumlah pelatihan teknis</p> <p>2. Masih sedikitnya jumlah bimbingan Teknis</p> <p>3. Masih sedikitnya jumlah temu usaha perikanan</p> <p>4. Masih rendahnya jumlah rekomendasi usaha perizinan</p> <p>5. Masih rendahnya jumlah kelompok yang teregistrasi</p> <p>6. Masih rendahnya jumlah kelompok yang dinilai</p> |
| | | <p>3. Belum Optimalnya Produksi Tangkap dan Konsumsi Ikan</p> | <p>1. Masih rendahnya jumlah SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)</p> <p>2. Masih rendahnya jumlah sarana dan prasarana perikanan</p> <p>3. Masih rendahnya jumlah asuransi pembudidaya ikan</p> <p>4. Masih rendahnya jumlah fasilitasi perlindungan usaha perikanan</p> <p>5. Masih rendahnya jumlah sosialisasi gemarikan</p> <p>6. Masih rendahnya jumlah angka konsumsi makan ikan</p> <p>7. Masih rendahnya jumlah</p> |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| | | | promosi penguatan daya saing |

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2021 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas dan Wewenang
- 1.3. Isu isu strategis
- 1.4. Permasalahan yang dihadapi
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 1.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan
 - 1.1.1 Visi
 - 1.1.2 Misi
 - 1.1.3 Tujuan dan Sasaran
 - 1.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan
- 1.2. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- 3.2. Pengukuran Kinerja 2020
- 3.3. Analiis dan Capaian Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN

2.1.1 Visi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa mendatang. Untuk dapat mewujudkan kondisi imajiner tersebut, maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dinas daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembangunan daerah yang lebih luas.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas bawah (Top-Down) dan bawah atas (Bottom-Top).

Sesuai dengan Undang-Undang di atas, maka Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah untuk periode waktu 5 tahun (2021-2026). Visi ini juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat. Hal ini

dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan daerah, propinsi dan nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak. Karena secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di sektor perikanan secara menyeluruh.

Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan, dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas / daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah.

Adapun Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Madani adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan Berbudaya** adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata,

sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat didefinisikan komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Stakeholder utama pembangunan daerah adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) dan sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah telah dirumuskan melalui 5 misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan Misi diatas, maka Dinas Perikanan dengan urusan Kelautan dan Perikanan termasuk ke dalam MISI 2 : **Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.** Pada sasaran meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perikanan berperan dalam pencapaian indikator persentase kontribusi sektor

perikanan terhadap PDRB dalam harga berlaku. Dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Daerah menetapkan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Unggulan Pembangunan Daerah. Adapun Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi
4. Pengembangan Pertanian dan Perikanan Menuju Agrobisnis
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Selanjutnya program unggulan daerah dituangkan dalam 5 misi Kepala Daerah. Dinas Perikanan melalui Misi 2, Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral dengan program unggulan : Pembukaan lahan baru perikanan seluas 1.000 Ha dan menghasilkan 20 juta bibit ikan perbulan.

1.1.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

REVISI PENJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN : 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 1. | Meningkatnya produksi dan Produktifitas Perikanan | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya | 3,55 |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan | Nilai Evaluasi Hasil AKIP | 75 |

| No | PROGRAM | ANGGARAN | KET |
|----|---|---------------------|-----|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 619.473.700,- | |
| 2 | Pengelolaan Perikanan Tangkap | Rp. 311.759.200,- | |
| 3 | Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp. 3.217.871.525,- | |
| 4 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Rp. 704.664.200,- | |

Pada Tahun 2021 Dinas Perikanan melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 54 Sub Keegiatandengan Pagu Anggaran **Rp. 7.324.604.310,-**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERIKANAN

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Kinerja suatu instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, strategi dari suatu instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 menyajikan hasil analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2021 | Realisasi 2021 | % Capaian | Predikat |
|-----------|--|--|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1. | Meningkatnya produksi dan Produktifitas Perikanan | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB- | 3,55 | 3,66 | 103,1 | Sangat Tinggi |
| 2) | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan | Nilai Evaluasi Hasil AKIP | 75 | 67,79 | 90,39 | Sangat Tinggi |

Rata rata Capaian indicator Kinerja sangat tinggi

3.2 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Untuk mencapai sasaran strategis dan indicator kinerja Dinas Perikanan

mengalami perubahan anggaran yaitu anggaran awal berjumlah Rp. 8.279.199.363 yang tertulis di Penetapan Kinerja 2021, namun di perubahan Anggaran berkurang menjadi Rp. 7.324.604.310

Berikut gambaran pengukuran capaian kinerja masing-masing sasaran strategis berserta analisisnya :

1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

Tahun 2021 Target Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Dinas Perikanan adalah 3,55 %. Dari hasil perhitungan yang dirilis BPS realisasi Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB melebihi target, dimana realisasinya adalah sebesar 3,66 % dengan tingkat capaian 103,1 %.

Untuk mendukung Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB ada beberapa Faktor yang mendukung :

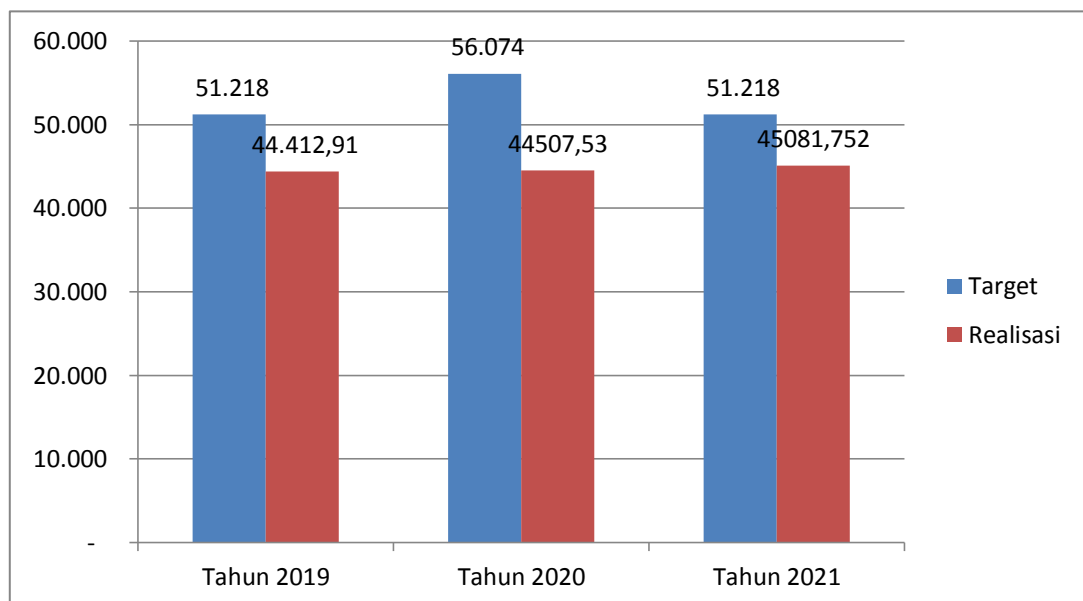
2. Tabel 3.2. Sasaran Strategis 1

| Sasaran Strategis 1 | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB | | | | | | | |
| Faktor Pendukung | Target 2019 | Realisasi 2019 | Target 2020 | Realisasi 2020 | Target 2021 | Realisasi 2021 | % Realisasi 2021 |
| Produksi Budidaya (ton/thn) | 51.218,40 | 44.412,91 | 56.073,83 | 44.507,53 | 51.218,40 | 45.081,752 | 88,02 |
| Produksi Tangkap (ton/ha) | 4.000 | 3.801,69 | 4.250 | 3.412,02 | 4.300 | 2.829,12 | 65,79 |
| Produksi benih Ikan (ekor) | 430.000.000 | 440.990.000 | 440.000.000 | 445.695.800 | 470.000.000 | 436.274.300 | 92,82 |
| Produksi Ikan Hias | 6.500.000 | 6.490.000 | 7.000.000 | 7.054.400 | 7.000.000 | 7.416.300 | 105,86 |
| Produksi Produk Unggulan Daerah | 300.000 | 372.000 | 350.000 | 452.000 | 450.000 | 736.500 | 163,67 |
| Produksi hasil olahan | 375 | 389,88 | 375 | 354.85 | 425 | 348,385 | 81,97 |
| Tingkat Produktifitas Perikanan | 4 Ton/ Ha | Ton/ Ha | 5 Ton/ Ha | 4,5 Ton/ Ha | 6 Ton/Ha | 4,5 Ton/Ha | 75 |

| Sasaran Strategis 1 | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan | | | | | | | |
| Jumlah Kelompok Perikanan (Kelompok) | 615 | 619 | 650 | 638 | 737 | 666 | 290,37 |
| Cakupan Bina Kelompok (%) | 80 | 75 | 85 | 77 | 90 | 65 | 72,22 |
| Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/ Kapita/ Tahun) | 34 Kg/Kapita/ Tahun | 35 Kg/Kapita/ Tahun | 35 Kg/Kapita/ Tahun | 38 Kg/Kapita/ Tahun | 38,5 Kg/Kapita/ Tahun | 39,24 Kg/Kapita/ Tahun | 101,92 |

a. Produksi budidaya

Produksi Budidaya pada Tahun 2021 belum mencapai target yaitu 51.218,40 Ton dengan realisasi 45.081,752 Ton. Namun dibandingkan dengan Tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan produksi. Peningkatan produksi dapat di lihat dari Grafik :



Dari Grafik di atas dapat dilihat terjadi peningkatan produksi setiap tahunnya mulai dari Tahun 2019 s.d 2021

Perikanan Budidaya adalah usaha memelihara dan mengembangbiakan ikan. Lokasi Budidaya perikanan pada Kolam air Tenang, Kolam air Deras, Bak/drum, Keramba sungai, jaring apung dan minapadi (memelihara ikan bersama padi). Kegiatan ini dilakukan oleh Pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok

pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun secara perorangan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan paling banyak dilakukan pada Kolam air tenang, keramba sungai, KJA, Minapadi dan Saluran Irigasi.

Untuk meningkatkan Produksi perikanan budidaya, Dinas Perikanan sudah melakukan beberapa Kegiatan yaitu Pembinaan cara budidaya ikan yang baik, Bantuan Benih dan pakan Ikan untuk Pokdakan, Pengembangan Keramba Jaring apung, Pengembangan keramba sungai, rehap kolam Pokdakan, Bantuan mesin pellet ikan, Pembangunan Sumur Bor dan Pembangunan Saluran air masuk dan keluar di Pokdakan. Belum tercapainya target produksi perikanan Budidaya disebabkan oleh ketersediaan air tidak sepanjang musim pada kolam pokdakan karena banyak kolam masyarakat yang sistem tadah hujan, sistem budidaya yang masih tradisional, mahalnya harga pakan dan juga musibah banjir.

Gambar 2. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan budidaya







Tabel 3.3. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Budidaya

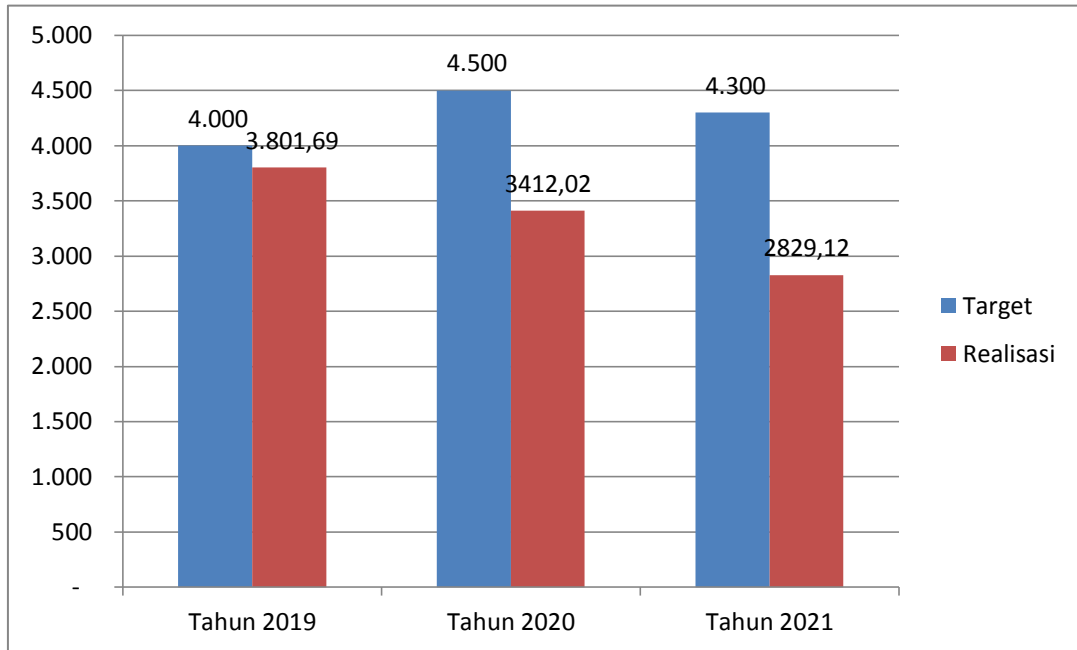
| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 1) | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya -Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 2.819.825.525 | 2.720.814.646 | 96,49 | 100 |
| | 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan | 900.363.100 | 897.811.425 | 99,72 | 100 |
| | 2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 547.421.700 | 542.790.320 | 99,15 | 100 |
| | 3) Penjaminan | 5.786.900 | 5.786.900 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu | | | | |
| 4) | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 42.523.725 | 42.154.150 | 99,13 | 100 |
| 5) | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 13.400.000 | 13.400.000 | 100 | 100 |
| 6) | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 1.263.628.300 | 1.172.890.051 | 92,82 | 100 |
| 7) | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 46.701.800 | 45.981.800 | 98,46 | 100 |
| | JUMLAH | 2.819.825.525 | 2.720.814.646 | 96,49 | 100 |

b. Produksi Tangkap

Untuk indikator jumlah produksi Perikanan tangkap yang dihasilkan pada tahun 2021 dari Target 4.300 ton masih jauh untuk mencapai target yaitu 2.829,12 ton. Dibandingkan pada Tahun 2020 dengan produksi 3.412,02 terjadi penurunan produksi.

Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Gambar 3.3. Grafik Produksi Tangkap (Ton/Tahun)

Dari grafik diatas, terjadi penurunan produksi pada tahun 2021 . Hal ini disebabkan karena hanya sebagian kecil Nelayan Penuh sedangkan sebagian besar merupakan Nelayan sambilan (hobi). Untuk mendukung hal tersebut Dinas Perikanan pada tahun 2021 melakukan pengembangan Lubuk Larangan, memberikan bantuan Perahu dan sarana alat tangkap Nelayan seperti jaring dll serta melakukan Restocking di Perairan Umum.

Gambar 4. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan tangkap



Bantuan Perahu untuk KUB



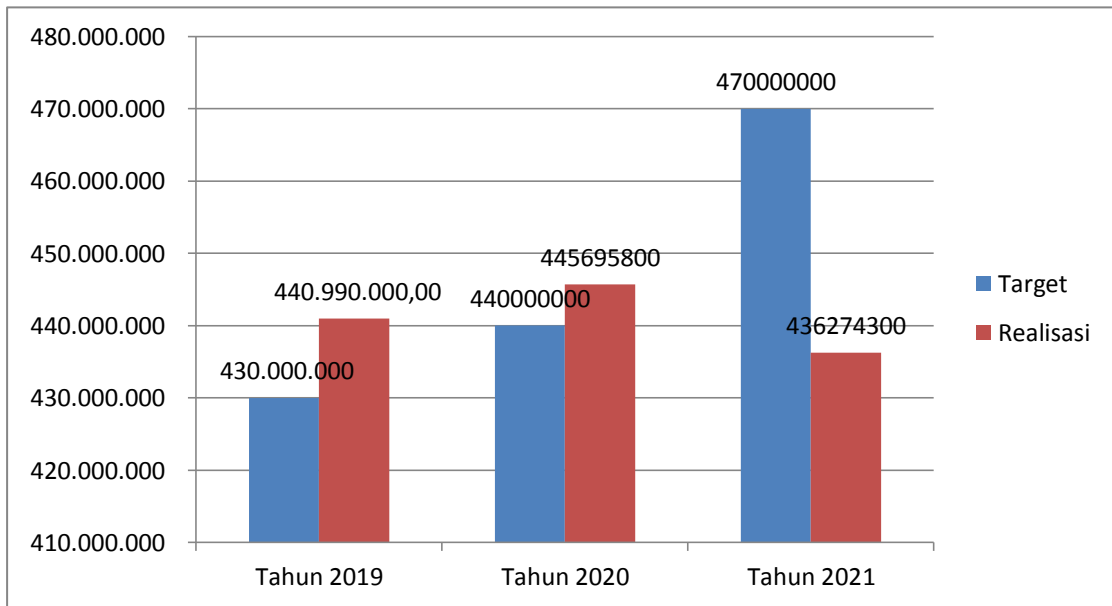
Pengadaan Benih Dan Pakan POKMASWAS

Tabel 3.4. Program dan kegiatan yang mendukung produksi tangkap

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| 1) | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | | | | |
| | -Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 290.024.000 | 282.479.499 | 97,40 | 100 |
| | 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7.100.000 | 7.085.000 | 99,79 | 100 |
| | 2) Penyediaan Prasarana Usaha perikanan Tangkap | 224.230.000 | 216.914.000 | 96,74 | 100 |
| | 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 58.694.000 | 58.480.499 | 99,64 | 100 |
| | JUMLAH | 290.024.000 | 282.479.499 | 96,49 | 100 |

c. Produksi Benih Ikan

Produksi benih ikan yang dihasilkan pada tahun 2021 belum mencapai target produksi yaitu target 470.000.000 ekor dengan realiasi 436.274.300 ekor. Terjadi penurunan produksi Benih Ikan pada tahun 2021 seperti yang terlihat pada diagram berikut ini



Gambar 3.5. Grafik Produksi Benih Ikan (Ekor/ Tahun)

Dari Grafik dapat dilihat adanya peningkatan produksi benih dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena kurangnya induk ikan dan tingginya tingkat kematian benih di tingkat pendederan yang disebabkan oleh faktor perubahan lingkungan dan penyakit. Untuk menghasilkan benih ikan yang berkualitas Pada tahun 2021 Dinas Perikanan sudah memberikan calon induk ikan nila, lele, gurami dan mas untuk Unit Pembenihan Rakyat. Selain itu juga Pengembangan Balai Benih Ikan.

Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Benih





Penebaran benih ikan nila di Pokdakan Harapan Jaya Harau

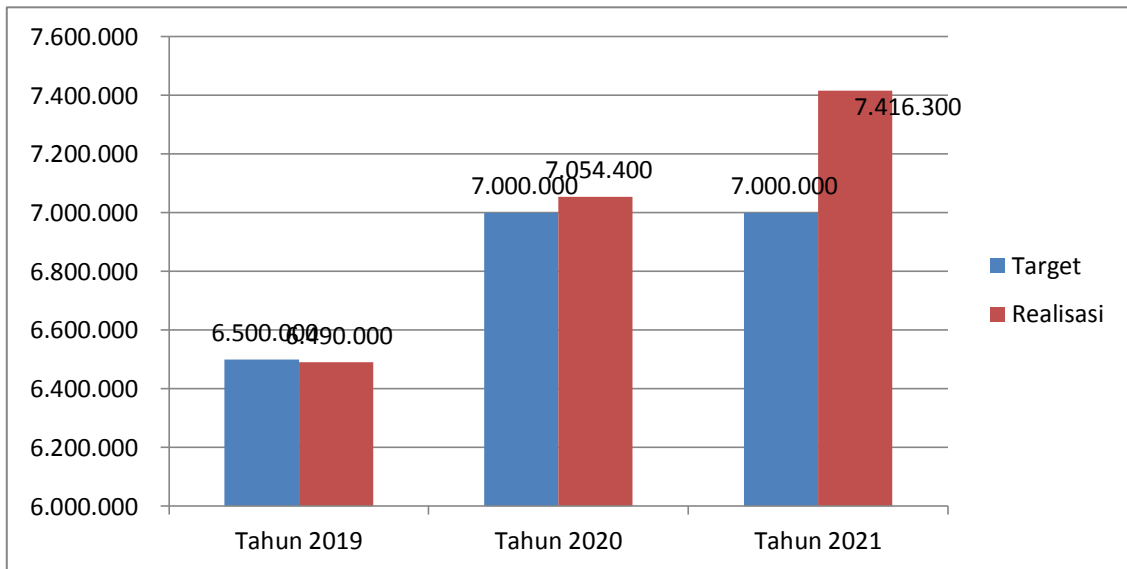
Tabel 3.5. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Benih Ikan

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 1) | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya -Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 2.819.825.525 | 2.720.814.646 | 96,49 | 100 |
| | 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan | 900.363.100 | 897.811.425 | 99,72 | 100 |
| | 2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 547.421.700 | 542.790.320 | 99,15 | 100 |
| | 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan | 5.786.900 | 5.786.900 | 100 | 100 |

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu | | | | |
| 4) | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 42.523.725 | 42.154.150 | 99,13 | 100 |
| 5) | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 13.400.000 | 13.400.000 | 100 | 100 |
| 6) | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 1.263.628.300 | 1.172.890.051 | 92,82 | 100 |
| 7) | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 46.701.800 | 45.981.800 | 98,46 | 100 |
| | JUMLAH | 2.819.825.525 | 2.720.814.646 | 96,49 | 100 |

d. Produksi Ikan hias

Produksi benih ikan hias yang dihasilkan sudah melebihi target produksi yaitu target 7.000.000 ekor dengan realiasi 7.416.300 ekor. Ikan hias yang dihasilkan di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Unit Pembenihan Rakyat dan Hactery Ikan Hias yang di bangun oleh Dinas Perikanan. Jenis ikan hias yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Ikan Koi, Mas Koki, Ikan Komet, ikan cupang, sepat biru, black molly dan manfish



Gambar 3.7. Grafik Produksi Ikan Hias (Ekor /Tahun)

Dari Grafik diatas dapat di lihat terjadi peningkatan Produksi Ikan Hias setiap tahunnya mulai dari Tahun 2019 s.d 2021. Untuk mendukung peningkatan produksi ikan hias Dinas Perikanan melakukan pengadaan Calon Induk Ikan Hias untuk UPR dan Hactery Ikan Hias.

Gambar 3.8. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi





Penebaran calon induk ikan hias di Nagari Mungo, Kecamatan Luak

Tabel 3.6. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi ikan hias

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 1) | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | | | | |
| | - Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 2.819.825.525 | 2.720.814.646 | 96,49 | 100 |
| | 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan | 900.363.100 | 897.811.425 | 99,72 | 100 |
| | 2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 547.421.700 | 542.790.320 | 99,15 | 100 |
| | 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana | 5.786.900 | 5.786.900 | 100 | 100 |

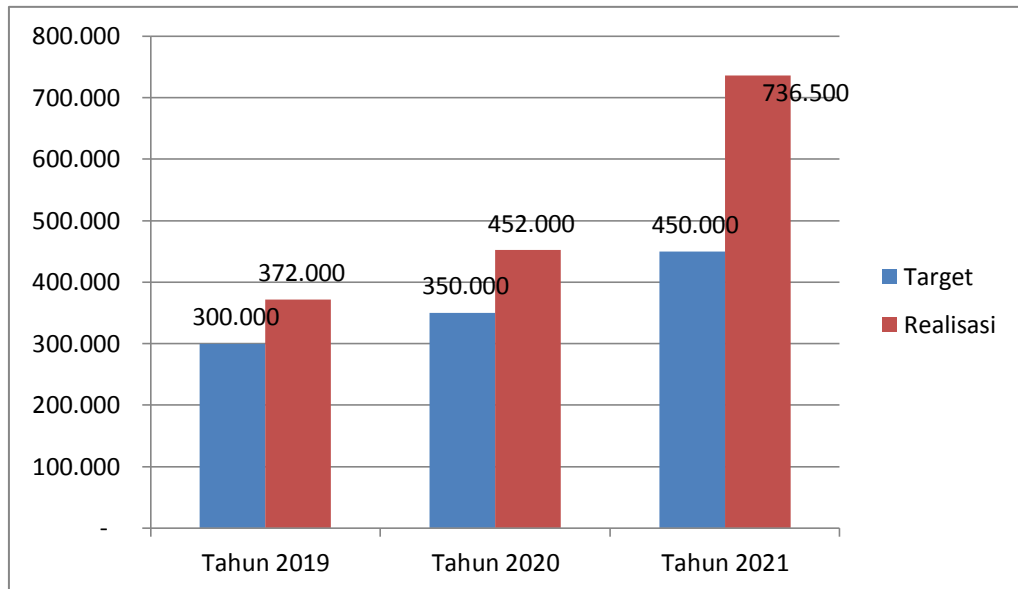
| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu | 42.523.725 | 42.154.150 | 99,13 | 100 |
| 4) | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 13.400.000 | 13.400.000 | 100 | 100 |
| 5) | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 1.263.628.300 | 1.172.890.051 | 92,82 | 100 |
| 6) | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 46.701.800 | 45.981.800 | 98,46 | 100 |
| 7) | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | |
| | JUMLAH | 2.819.825.525 | 2.720.814.646 | 96,49 | 100 |

e. Produksi Produk Unggulan Daerah

Produksi Produk Unggulan Daerah adalah ikan gurami sago. Ikan Gurami Sago sudah di rilis oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/ Kepmen-KP/2017 tentang Pelepasan Ikan Gurami Sago. Pada Tahun 2017 Ikan Gurami Sago sudah ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah.

Produksi Ikan Gurami Sago meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 dengan target produksi 450.000ekor dengan realisasi jauh melebihi target 736.500 ekor. Produksi Gurami Sago dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.9. Grafik Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor)

Dari grafik di atas dapat dilihat adanya peningkatan produksi setiap tahunnya. Untuk meningkatkan produksi Ikan gurami sago Dinas Perikanan sudah memberikan bantuan calon induk Gurami Sago kepada Kelompok Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) setiap tahunnya.

Gambar 3.10. Dokumentasi Kegiatan mendukung produksi Gurami Sago



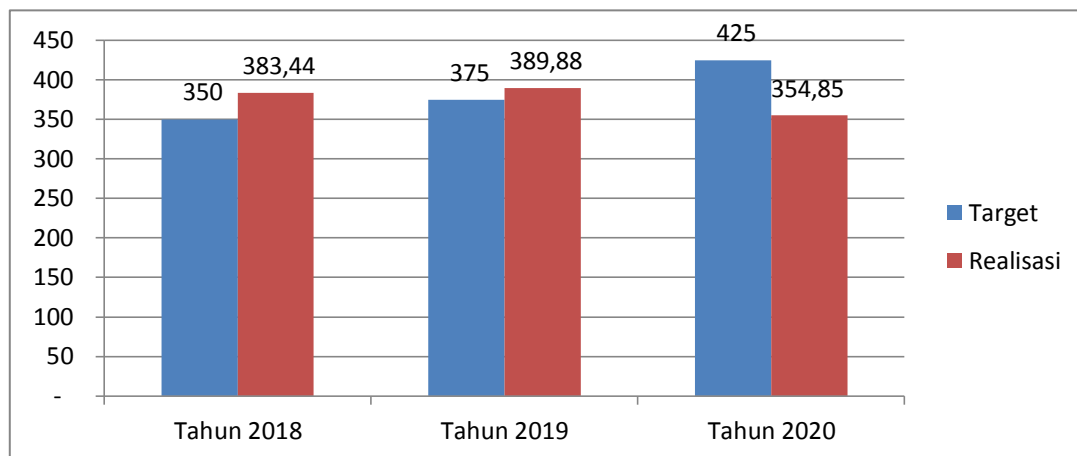
Pengadaan Calon Induk Ikan Gurami Sago

Tabel 3.7. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi produk unggulan daerah

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|--|------------------|------------------|------------|------------|
| 1) | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | | | | |
| | -Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 5.786.900 | 5.786.900 | 100 | 100 |
| | 1) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu | 5.786.900 | 5.786.900 | 100 | 100 |
| | JUMLAH | 5.786.900 | 5.786.900 | 100 | 100 |

f. Produksi hasil olahan

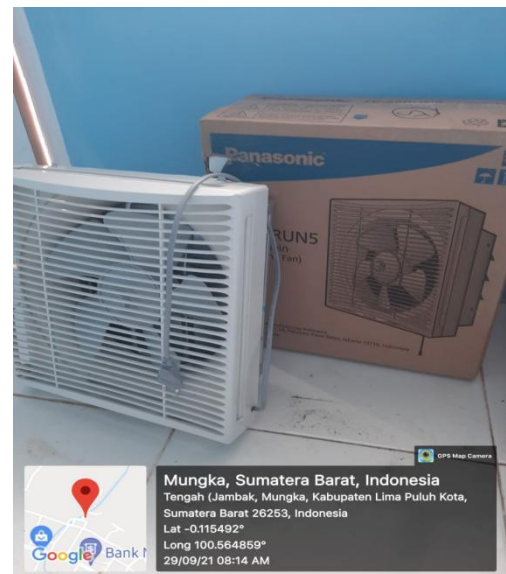
Produksi olahan hasil perikanan Tahun 2021 adalah 348,385 ton dengan target 425 ton. Dibandingkan Tahun 2020 dengan realisasi 389,88 ton terjadi penurunan produksi. Produksi olahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 3.11. Grafik Produksi Hasil Olahan(Ton/ Tahun)

Dari Grafik di atas dapat dilihat terjadi peningkatan produksi dari tahun 2019 ke tahun 2020, dan terjadi penurunan produksi pada tahun 2021. Penurunan produksi ini disebabkan karena pengaruh Pandemi Covid 19. Daya beli masyarakat makin menurun. Untuk meningkatkan promosi produk hasil olahan ikan, Dinas Perikanan sudah berupaya memberikan bantuan berupa pembangunan kios mini untuk pemasaran ikan dan produk hasil perikanan.

Gambar 3.12. Dokumentasi Kegiatan mendukung Produksi Olahan Hasil Perikanan



Bantuan pembangunan Kios Mini pemasaran hasil perikanan beserta sarana



Ikan Patin Asap



Abon Bayi ikan Gurami Sago

Follow akun resmi Tom Burger :
www.tomburgerindonesia.com
 Tom Burger Group
 @tomburgerindonesia

TOMEZ FOOD
"Healthy food is better"

Beri digunakan sebelum
 Kode Produk:

Prodiuser oleh :
 Tom Burger Group
 Kabupaten Tembunguh Kota 26271
 Sumatera Barat-Indonesia

Siomay Tuna
 Siomay Ikan Tuna

TOMEZ FOOD
"Healthy food is better"

Berat bersih 220 gram

SIMPAN DALAM SUHU -18°C

SIEMEN
 100% BUNYI
 PABT 100-1000000000

Komposisi :
 Ikan tuna, tapioka, kulit pangsit,
 air, bawang merah, bawang putih, garam,
 merica, dan bumbu kacang

Petunjuk penyajian :
 1. Simpan siomay tuna dalam suhu -18°C.
 2. Buka kemasan siomay tuna
 3. Siomay tuna siap untuk digoreng, dan direbus/dikukus
 4. Panaskan air untuk bumbu kacang

Siomay Ikan Tuna

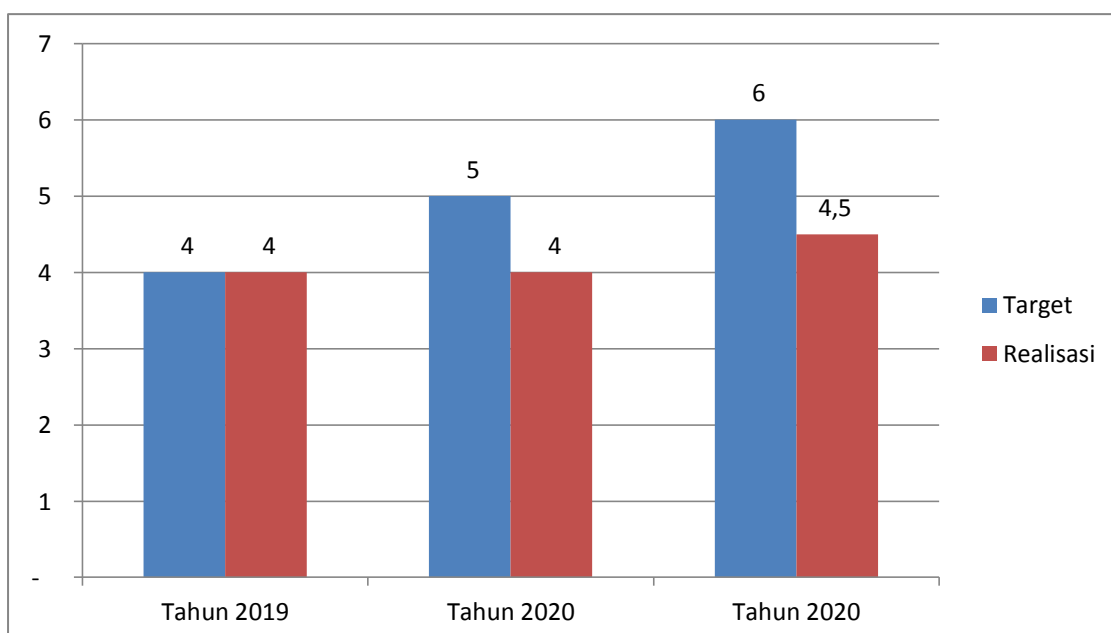
Tabel 3.8. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi hasil olahan perikanan

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| 1) | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | | |
| | - Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 72.955.200 | 72.035.898 | 98,74 | 100 |
| | 1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 72.955.200 | 72.035.898 | 98,74 | 100 |
| | - Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 23.315.000 | 22.525.000 | 96,61 | 100 |
| | 2) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 23.315.000 | 22.525.000 | 96,61 | 100 |
| | - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri | 608.394.000 | 603.076.239 | 99,13 | 100 |

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|---|--------------------|--------------------|------------|------------|
| | Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 366.200.000 | 364.073.139 | 99,42 | 100 |
| | 3) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 242.194.000 | 239.003.100 | 98,68 | 100 |
| | 4) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | JUMLAH | 704.664.200 | 697.637.137 | 99 | 100 |

g. Tingkat Produktifitas Perikanan

Tingkat capaian indikator kinerja Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya tahun 2021 tidak mencapai target yaitu 4,5 ton/Ha, dari Target 6 ton/Ha. Peningkatan Produktifitas didukung oleh kegiatan Ektensifikasi dan Intensifikasi . Tingkat produktifitas dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 3.13. Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/ Tahun)

Untuk meningkatkan produktifitas dilakukan dengan cara Extensifikasi dan Intensifikasi. Kegiatan Ektensifikasi Pada tahun 2021 dengan Pemanfaatan Escavator untuk membuka Lahan Baru. Pada Tahun 2021 terjadi Penambahan Lahan Baru yaitu 7,4 Ha. Selain dari Anggaran APBD Dinas Perikanan juga dengan memanfaatkan dana BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari) untuk kegiatan Perikanan.

Untuk kegiatan Intensifikasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap pembudidaya ikan untuk melaksanakan kegiatan perikanan dari sistem tradisional menjadi intensif dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kegiatan intensifikasi seperti demplot percontohan, Penerapan CPIB (Cara pembenihan Ikan yang baik) dan CBIB (Cara Budidaya ikan yang baik) kepada Pembudidaya ikan, melaksanakan revitalisasi kolam pembudidaya ikan serta keramba jaring apung, keramba sungai, Minapadi, Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) sehingga bisa menekan harga Pakan ikan dan Menekan penyakit ikan.

Gambar 3.14. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung peningkatan produktifitas perikanan



Extensifikasi kolam baru dengan memanfaatkan escavator



Tabel 3.9. Program dan Kegiatan yang mendukung Tingkat Produktivitas Perikanan

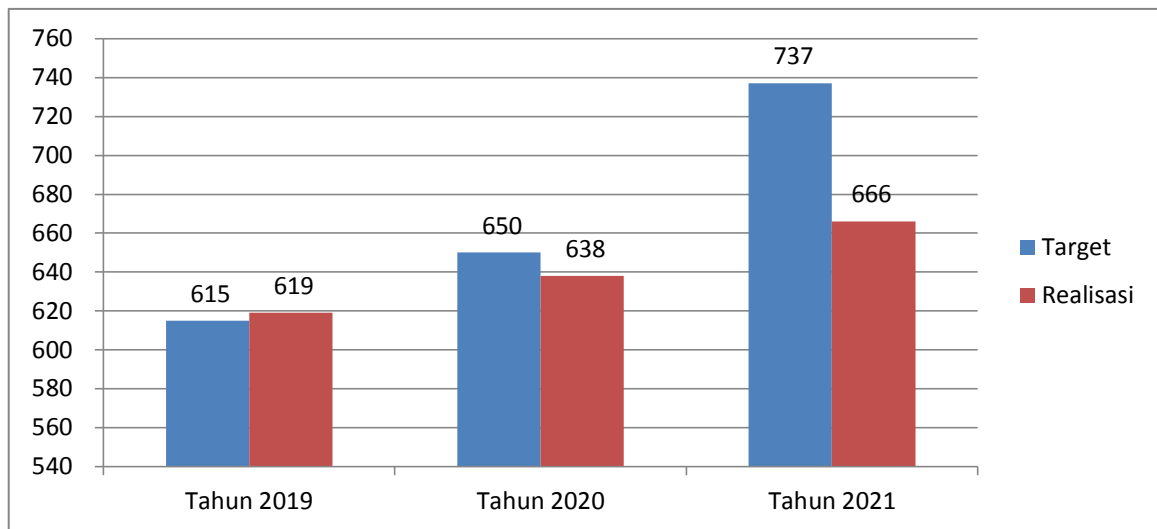
| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|---|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| 1) | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | | |
| | -Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 72.955.200 | 72.035.898 | 98,74 | 100 |
| 5) | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 72.955.200 | 72.035.898 | 98,74 | 100 |
| | - Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 23.315.000 | 22.525.000 | 96,61 | 100 |

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| | 6) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 23.315.000 | 22.525.000 | 96,61 | 100 |
| | - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 608.394.000 | 603.076.239 | 99,13 | 100 |
| | 7) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 366.200.000 | 364.073.139 | 99,42 | 100 |
| | 8) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 242.194.000 | 239.003.100 | 98,68 | 100 |
| | JUMLAH | 704.664.200 | 697.637.137 | 99 | 100 |

h. Jumlah kelompok Perikanan

Tingkat capaian indikator kinerja Jumlah Kelompok Perikanan pada Tahun 2021 tidak mencapai target yaitu 666 kelompok, dari Target 737 kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari Pokdakan, Pokmaswas,

Poklahsar dan KUB. Peningkatan jumlah kelompok perikanan dapat dilihat dari grafik di bawah ini :



Gambar 3.15. Jumlah Kelompok perikanan (Kelompok /Tahun)

Dari Grafik diatas dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah kelompok perikanan setiap tahunnya mulai dari tahun 2019-2021. Meskipun realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) adalah: Kumpulan para pembudidaya ikan yang terbentuk dan tumbuh atas dasar adanya kepentingan bersama dengan rasa saling percaya, keserasian dan keakraban untuk bekerjasama dalam rangka memanfaatkan sumberdaya, mengembangkan usaha, dana, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pokdakan di Kabupaten Lima puluh kota tersebar di seluruh Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sampai akhir tahun 2021 Pokdakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 566 kelompok. Kegiatan yang di lakukan oleh Pokdakan adalah usaha pembesaran dan pembenihan ikan.

Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas) adalah Sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya. Pokmaswas ini tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota . Jumlah Pokmaswas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak sampai tahun 2021 adalah 60 Kelompok. Pokmaswas tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil perikanan (Poklahsar) adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok. Poklahsar yang sudah terdaftar sebanyak 24 Kelompok. Poklahsar baru ada di Kecamatan Harau, Payakumbuh, Mungka, Pangkalan, Kapur IX, Guguk dan Suliki. Kegiatan yang dilakukan oleh Poklahsar adalah Pengolahan ikan Asap, Bakso Ikan, Peyek Ikan, Nugget, Burger Ikan, Dendeng Ikan, Pizza Ikan, Sosis Ikan dan Tahu Tuna.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. KUB yang sudah terdaftar terdapat di sekitar waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Kegiatan yang dilakukan oleh KUB adalah melaksanakan penangkapan ikan di Perairan Umum (Waduk PLTA Koto Panjang). Sampai akhir tahun 2021 terdapat 16 KUB yang terdaftar pada Dinas Perikanan. Pada Tahun 2019 Nelayan yang tergabung dalam KUB sudah mendapatkan Kartu Asuransi Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Untuk mendukung peningkatan jumlah kelompok perikanan, Dinas Perikanan melakukan Pembinaan baik oleh Penyuluh Perikanan maupun aparatur Dinas perikanan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan teknis. Selain itu penyaluran bantuan dilakukan kepada kelompok bukan perorangan.

Gambar 3.16. Kegiatan yang mendukung peningkatan kelompok perikanan



Tabel 3.10. Program dan Kegiatan yang mendukung Jumlah Kelompok Perikanan

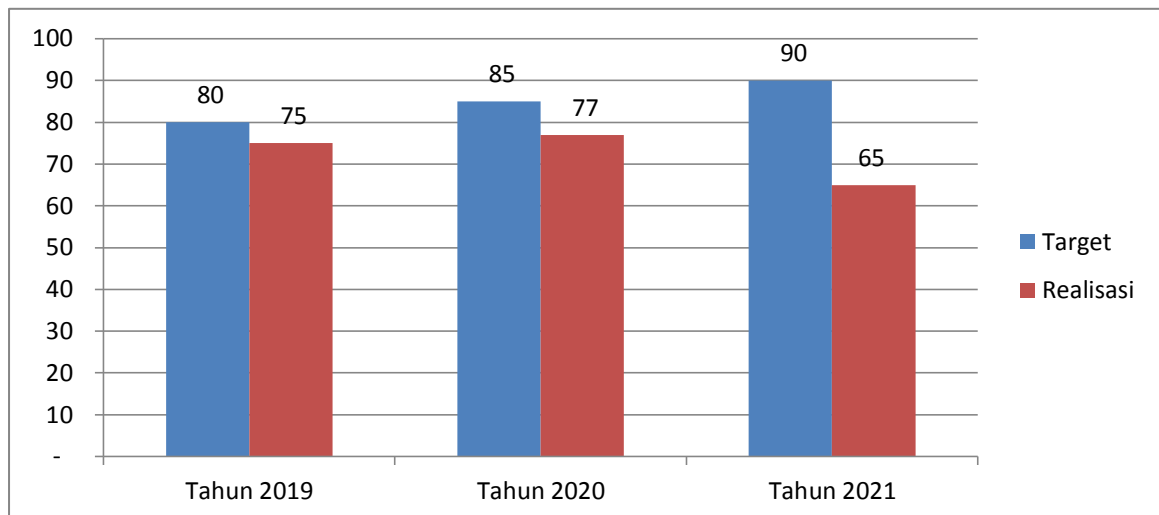
| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|---|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| 1) | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap -Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 21.735.200 | 21.555.200 | 99,17 | 100 |
| 1) | Pengembangan Kapasitas Nelayan | 860.000 | 710.000 | 82,56 | 100 |

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | Kecil | | | | |
| 2) | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 20.875.200 | 20.845.200 | 99,86 | 100 |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya -Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 393.068.000 | 381.794.540 | 97,13 | 100 |
| 3) | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 25.592.000 | 19.622.000 | 76,67 | 100 |
| 4) | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 35.756.500 | 32.082.500 | 89,72 | 92 |
| 5) | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha | 300.090.000 | 299.005.540 | 99,64 | 100 |
| 6) | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 31.629.500 | 31.084.500 | 98,28 | 100 |
| | JUMLAH | 414.803.200 | 403.349.740 | 96,49 | 98,67 |

i. Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Untuk indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Perikanan Tahun 2021 tidak mencapai target yaitu dari target 90 % tercapai 65 %. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah persentase kelompok perikanan yang tersentuh oleh program pemerintah baik dana APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus APBD Provinsi. Selain tersentuh oleh bantuan pemerintah juga dilakukan pembinaan, monitoring dan Evaluasi secara teknis oleh Aparatur Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan.

Pada Tahun 2020 Badan Riset Sumberdaya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menetapkan salah satu kelompok yaitu kelompok Anak Kociak di Nagari Suliki Kecamatan Suliki sebagai percontohan Desa Inovasi dengan komoditas gurame, udang galah, koi, probiotik dan maggot



Gambar 3.17. Persentase cakupan bina kelompok

Dari grafik diatas, dapat dilihat terjadi penurunan cakupan bina kelompok dari tahun 2020 ke tahun 2021. Untuk pencapaian setiap tahunnya belum mencapai target.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan adalah menyalurkan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) seperti bantuan benih dan pakan, bantuan calon induk ikan, revitalisasi kolam rakyat, pengembangan keramba jaring apung, pengembangan keramba sungai, Minapadi, Bantuan saran dan prasarana, Gerakan pakan ikan mandiri. Bantuan yang disalurkan kepada Kelompok Masyarakat pengawas adalah Pengadaan benih dan pakan untuk lubang larangan, pembangunan

shelter, pembangunan pos jaga, pembangunan kolam pembenihan ikan langka. Bantuan yang disalurkan kepada kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) adalah Pembangunan kios mini pemasaran, pembangunan los pasar ikan, pembangunan bangsal pengolahan, pengadaan alat alat pengolahan, pengadaan alat alat pemasaran. Sedangkan bantuan yang disalurkan kepada Kelompok usaha bersama (KUB) adalah bantuan perahu, bantuan alat tangkap, asuransi nelayan. Bantuan tersebut sudah disalurkan sejak Dinas Perikanan berdiri tahun 2008. Bantuan yang sudah disalurkan tersebut ada yang berkembang dan ada juga yang tidak berkembang.

Gambar 3.18. Dokumentasi kegiatan Cakupan Bina Kelompok Perikanan





Tabel 3.11. Program dan Kegiatan yang mendukung cakupan bina kelompok

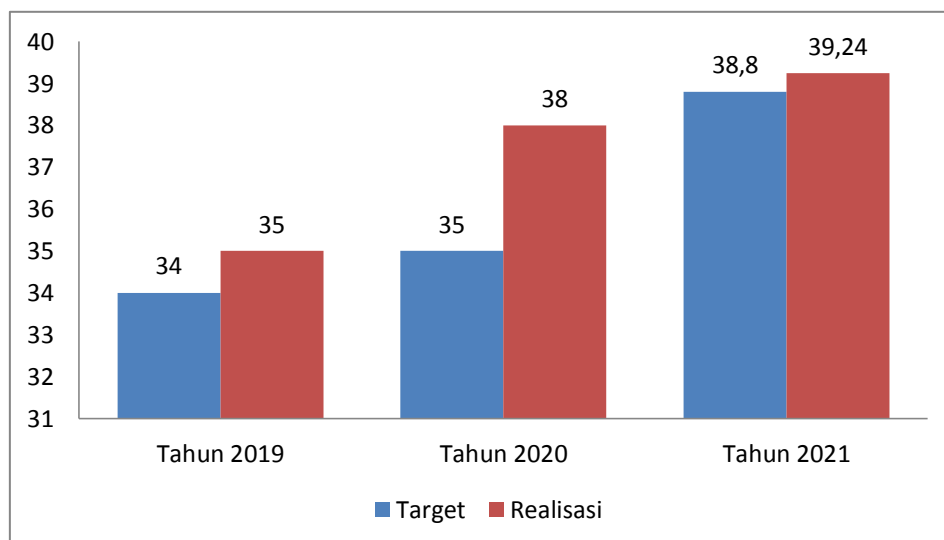
| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| 1) | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | | | | |
| | -Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| 1) | Penyediaan Prasarana Usaha perikanan Tangkap | 224.230.000 | 216.914.000 | 96,74 | 100 |
| 2) | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 58.694.000 | 58.480.499 | 99,64 | 100 |
| | -Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 21.735.200 | 21.555.200 | 99,17 | 100 |
| 1) | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 860.000 | 710.000 | 82,56 | 100 |
| 2) | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 20.875.200 | 20.845.200 | 99,86 | 100 |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 393.068.000 | 381.794.540 | 97,13 | 100 |
| | -Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | |
| 3) | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 25.592.000 | 19.622.000 | 76,67 | 100 |

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|--|---------------|-------------|------------|---------|
| | 4) Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 35.756.500 | 32.082.500 | 89,72 | 92 |
| | 5) Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha | 300.090.000 | 299.005.540 | 99,64 | 100 |
| | 6) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 31.629.500 | 31.084.500 | 98,28 | 100 |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | |
| | 7) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 547.421.700 | 542.790.320 | 99,15 | 100 |
| | 8) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu | 5.786.900 | 5.786.900 | 100 | 100 |
| | 9) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 42.523.725 | 42.154.150 | 99,13 | 100 |

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | 10)Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 13.400.000 | 13.400.000 | 100 | 100 |
| | 11)Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 1.263.628.300 | 1.172.890.051 | 92,82 | 100 |
| | 12)Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 46.701.800 | 45.981.800 | 98,46 | 100 |
| | JUMLAH | 2.617.189.625 | 2.501.747.460 | 95,58 | 99,42 |

j. Tingkat Konsumsi Makan Ikan :

Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sudah melebihi target yaitu 38,5 Kg/kapita/tahun dengan realisasi 39,24 Kg/Kapita/Tahun. Tingkat Konsumsi makan ikan meningkat setiap tahunnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 3.19. Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Dari Grafik diatas terlihat tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat setiap tahunnya dan sudah melebihi target yang sudah ditentukan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan membuat diservikasi produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak otak ikan. Selain itu dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan upaya seperti kegiatan Promosi lewat Baliho, Kegiatan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) mulai dari tingkat Nagari dan lomba-lomba masak serba ikan.

Gambar 3.20. Kegiatan yang mendukung Peningkatan Konsumsi



Baliho Gemarikan Makan Ikan



Banner Gemar Ikan

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas Perikanan **OMEGA - 3**

TEMUKAN MANFAAT SEHAT DENGAN MAKAN IKAN

KEPALA & MATA

Pada kepala & mata ikan mengandung Polyscharida yang berfungsi mengontrol aliran darah.

PERUT

Lemak pada perut ikan mengandung lemak omega-3 (EPA) yang berfungsi mencegah penyempitan pembuluh darah dan dapat menurunkan kolesterol.

DAGING

Daging ikan mengandung protein ber kualitas tinggi dan vitamin yang sangat berguna untuk pertumbuhan dan ketahanan tubuh.

MINYAK IKAN

Minyak ikan mengandung DHA (Decosa Hexanoic Acid) yang sangat penting dalam pertumbuhan serta perkembangan otak.

KULIT

Kulit ikan mengandung Vitamin A & B2 yang sangat bermanfaat untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh.

IKAN MERUPAKAN SUMBER PANGAN YANG KOMPLEKS KARENA DI DALAM TUBUH IKAN BANYAK TERKANDUNG ZAT GIZI YANG BERMANFAAT BAGI TUBUH SEPERTI PROTEIN, LEMAK, VITAMIN DAN MINERAL.

SALAH SATU ZAT YANG MEMUNYAI MANFAAT SANGAT BESAR BAGI TUBUH ADALAH SENYAWA ASAM LEMAK TAK JENUH ECOSA PENTANOIC ACID (EPA) DAN DECOSA HEXANOIC ACID (DHA) (OMEGA-3 & OMEGA-6) YANG SANGAT ESENSIAL BAGI TUBUH.

MANFAAT (EPA) DAN (DHA) BAGI TUBUH ADALAH

- MENINGKATKAN PERKEMBANGAN DAN VOLUME OTAK (UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN DAN DAYA INGAT)
- MENGURANGI RISIKO SERANGAN JANTUNG KORONER
- MENINGKATKAN PERTUMBUHAN ETINA MATA (MENJAGA RETAJAMAN PENGLIHATAN)
- MENINGKATKAN ELASTISITAS DAN PERSENDIAN (ENGURANGI PEGAL PEGAL DAN RASA KAKU PERSENDIAN)

| KANDUNGAN GIZI | KARAKTERISTIK DAN FUNGSI |
|---|--|
| <p>Protein : 18-20</p> <p>Lemak : 1 - 20 %</p> <p>Kalori Rendah</p> <p>Vitamin A</p> <p>Vitamin D</p> <p>Vitamin B1, B3, B6, B12, dan Biotin</p> <p>Yodium, Flour, Selenium, Zat besi dan Kalsium</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas tinggi terutama Asam Amino Lysine dan Treonine - Tidak rusak oleh pemasasan - Penyerapannya lebih banyak dibandingkan dengan daging ayam dan sapi - Omega-3- - Untuk pertumbuhan dan perkembangan otak atau kecerdasan - Untuk penglihatan - Untuk pencegahan penyakit jantung, kencing manis, reumatik, asthma, Penyakit kulit dan kanker - Cocok untuk diet. - Untuk Kesehatan mata. - Untuk Kesehatan tulang dan gigi serta penyerapan kalsium dan fosfor. - Untuk metabolisme dan tumbuh kembang anak. - Pembentukan hormon tiroid, mencegah gondok, kesehatan gigi, mencegah penuaan dini, mencegah amenia serta pertumbuhan tulang dan gigi. |

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Poster Gemar Ikan



Pembagian hadiah lomba masak serba ikan

Tabel 3.12. Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat konsumsi ikan

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| 1) | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | | |
| | -Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 72.955.200 | 72.035.898 | 98,74 | 100 |
| 9) | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 72.955.200 | 72.035.898 | 98,74 | 100 |
| | - Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 23.315.000 | 22.525.000 | 96,61 | 100 |
| 10) | Pelaksanaan | 23.315.000 | 22.525.000 | 96,61 | 100 |

| No | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | % Keuangan | % Fisik |
|----|---|--------------------|--------------------|------------|------------|
| | Bimbingan dan Penerapan Persyaaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 608.394.000 | 603.076.239 | 99,13 | 100 |
| | - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 366.200.000 | 364.073.139 | 99,42 | 100 |
| | 11)Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 242.194.000 | 239.003.100 | 98,68 | 100 |
| | 12)Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | JUMLAH | 704.664.200 | 697.637.137 | 99 | 100 |

2) Tabel 3.13. Sasaran Strategis 2

| SASARAN STRATEGIS 2 : | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN | | | | | | | |
| NO | Indikator | Target 2018 | Realisasi 2018 | Target 2019 | Realiasi 2019 | Target 2020 | Realiasi 2020 |
| 1 | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP | 65 | 64,62 | 70 | 69,14 | 75 | 67,79 |

2. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Tahun 2021 Dinas Perikanan merupakan salah satu OPD Sampel SAKIP Lima Puluh Kota. Nilai SAKIP Dinas Perikanan yang di evaluasi oleh Inspektorat adalah SAKIP Tahun 2020. Dari hasil evaluasi Inspektorat tersebut SAKIP Dinas Perikanan mendapat nilai 67,79 dengan kategori B dengan pengertian Baik. Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja dengan nilai 21,31

- 1) Untuk Komponen Perencanaan Kinerja Khususnya dokumen perencanaan strategis, Dinas Perikanan telah memiliki dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang telah memuat tujuan, indikator tujuan, Sasaran, indikator sasaran dan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan beserta targetnya, namun tujuan dalam renstra hanya memiliki 1 indikator tujuan dan masih ada sasaran yang hanya dilengkapi dengan 1 indikator sasaran.
- 2) Target jangka menengah dalam renstra belum sepenuhnya dimonitor
- 3) Untuk Perencanaan Kinerja telah disusun dan telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan. Sasaran juga telah berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik
- 4) Rencana aksi telah disusun dan mencantumkan target secara periodic atas kinerja namun belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam penyusunan anggaran.

- 5) Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
- 6) Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala
- 7) Renstra belum direvisi secara berkala
- 8) Renstra atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala

Tanggapan : - Perencanaan kinerja sudah diperbaiki dengan adanya revisi renstra Tahun 2016 s.d 2021
 - Sudah dilakukan Coaching oleh Kementrian PAN dan RB

B. Pengukuran Kinerja dengan nilai 14,69

- 1) Untuk komponen pengukuran kinerja ini, Dinas Perikanan telah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara Formal namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang dan IKU belum direvisi secara berkala
- 2) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala
- 3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- 4) IKU belum dimanfaatkan penilaian kerja, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
- 5) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Eselon IV keatas belum dikaitkan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment

Tanggapan : Pengukuran kinerja sudah lebih dioptimalkan pemanfaatannya didalam dokumen perencanaan

C. Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,42

- 1) Laporan kinerja masih hanya berupa info tentang upaya efisien yang dilakukan

- 2) Informasi disajikan dalam laporan kinerja belum dapat sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

Tanggapan : Pelaporan kinerja sudah sudah dioptimalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

D. Evaluasi Internal dengan nilai 6,95

- 1) Evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program
- 2) Pemantauan rencana aksi belum dilakukan secara bulanan dan belum terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikanan
- 3) Hasil Evaluasi Rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.

Tanggapan : Rencana aksi sudah dipantau setiap triwulan dan dilaporkan realisasinya

E. Pencapaian Sasaran / Kinerja organisasi dengan nilai 14,43

- 1) Beberapa target kinerja tercapai dengan baik
- 2) Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

Tanggapan : Target kinerja yang tidak tercapai tahun sebelumnya lebih diprioritaskan tahun berikutnya.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah di tetapkan , Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Tahun 2021

| Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 7.324.604.310 | 7.143.035.577 | 97.52 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.090.309.385 | 3.033.776.555 | 98.17 |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 69.672.200 | 69.041.800 | 99.10 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.725.700 | 13.392.500 | 97.57 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.636.000 | 3.572.000 | 98.24 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.651.000 | 3.643.000 | 99.78 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.000.000 | 2.977.000 | 99.23 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.575.000 | 2.575.000 | 100.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 37.396.500 | 37.324.300 | 99.81 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.688.000 | 5.558.000 | 97.71 |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.023.525.285 | 1.980.321.782 | 97.86 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.013.469.285 | 1.970.429.982 | 97.86 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 973.000 | 945.000 | 97.12 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.918.000 | 4.913.800 | 99.91 |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeiksaan ke Luar Daerah | 2.091.000 | 1.966.000 | 94.02 |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2.074.000 | 2.067.000 | 99.66 |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 60.500.000 | 60.500.000 | 100.00 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 6.500.000 | 6.500.000 | 100.00 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 54.000.000 | 54.000.000 | 100.00 |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 270.196.900 | 266.524.096 | 98.64 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.277.000 | 1.277.000 | 100.00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 68.102.400 | 67.962.200 | 99.79 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.620.000 | 1.620.000 | 100.00 |
| Penyediaan Bahan logistik Kantor | 6.505.100 | 6.505.100 | 100.00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 25.596.900 | 25.596.900 | 100.00 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 4.560.000 | 4.560.000 | 100.00 |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | 5.637.500 | 5.637.500 | 100.00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 156.898.000 | 153.365.396 | 97.75 |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 7.500.000 | 7.500.000 | 100.00 |
| Pengadaan Mebel | 7.500.000 | 7.500.000 | 100.00 |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 411.509.000 | 403.773.391 | 98.12 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.100.000 | 2.096.000 | 99.81 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 39.640.000 | 34.455.359 | 86.92 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 369.769.000 | 367.222.032 | 99.31 |

| Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 247.406.000 | 246.115.486 | 99.48 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 172.386.000 | 172.385.050 | 100.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 20.000.000 | 20.000.000 | 100.00 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.710.000 | 7.710.000 | 100.00 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 47.310.000 | 46.020.436 | 97.27 |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 311.759.200 | 304.034.699 | 97.52 |
| Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 290.024.000 | 282.479.499 | 97.40 |
| Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 7.100.000 | 7.085.000 | 99.79 |
| Penyediaan Prasarana Usaha perikanan Tangkap | 224.230.000 | 216.914.000 | 96.74 |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 58.694.000 | 58.480.499 | 99.64 |
| Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 21.735.200 | 21.555.200 | 99.17 |
| Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 860.000 | 710.000 | 82.56 |
| Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 20.875.200 | 20.845.200 | 99.86 |
| Program Perikanan Budidaya | 3.217.871.525 | 3.107.587.186 | 96.57 |
| Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 393.068.000 | 381.794.540 | 97.13 |
| Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 25.592.000 | 19.622.000 | 76.67 |
| Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 35.756.500 | 32.082.500 | 89.72 |
| Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha | 300.090.000 | 299.005.540 | 99.64 |
| Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 31.629.500 | 31.084.500 | 98.28 |
| Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4.978.000 | 4.978.000 | 100.00 |
| Penetapan Persyaratan dan prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4.978.000 | 4.978.000 | 100.00 |
| Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 2.819.825.525 | 2.720.814.646 | 96.49 |
| Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 900.363.100 | 897.811.425 | 99.72 |
| Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 547.421.700 | 542.790.320 | 99.15 |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.786.900 | 5.786.900 | 100.00 |
| Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 42.523.725 | 42.154.150 | 99.13 |
| Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 13.400.000 | 13.400.000 | 100.00 |
| Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 1.263.628.300 | 1.172.890.051 | 92.82 |
| Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 46.701.800 | 45.981.800 | 98.46 |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 704.664.200 | 697.637.137 | 99.00 |
| Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 72.955.200 | 72.035.898 | 98.74 |
| Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan | 72.955.200 | 72.035.898 | 98.74 |

| Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 23.315.000 | 22.525.000 | 96.61 |
| Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 23.315.000 | 22.525.000 | 96.61 |
| Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 608.394.000 | 603.076.239 | 99.13 |
| Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 366.200.000 | 364.073.139 | 99.42 |
| Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 242.194.000 | 239.003.100 | 98.68 |

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban *keberhasilan/kegagalan* Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2021, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang

Capaian kinerja tersebut baik berhasil maupun tidak berhasil memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa akan datang.

Demikian Laporan Instansi Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 untuk disampaikan sebagai pedoman selanjutnya, semoga dapat bermanfaat.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Sarilamak, Januari 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota

MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19710808 199803 1 004